

## Pendapatan Retribusi Daerah- Sepi Peminat, Realisasi PAD Sektor Pariwisata Sinjai Masih 25 Persen



Sumber gambar:

<https://kabarsinjai.com/sepi-peminat-realisasi-pad-sektor-pariwisata-sinjai-masih-25-persen/>

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pariwisata melandai. Dari data yang diterima media ini, total realisasi PAD hingga triwulan II (Januari-Juni) baru menyentuh diangka Rp278 juta dari target PAD tahun 2024 sebesar Rp1,071 Miliar lebih atau dikisaran 25 persen.

Itu artinya masih ada sisa PAD yang harus dikejar hingga Akhir tahun 2024 sebesar Rp792 juta lebih.

Terdapat dua jenis penerimaan retribusi untuk PAD yang dikelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Sinjai, diantaranya pemakaian kekayaan daerah dan tempat rekreasi dan olahraga dari target Rp798 juta baru terealisasi Rp199 juta lebih. Sedang pemakaian kekayaan daerah dari target Rp272 juta baru mencapai Rp79 juta.

Jenis Pemakaian Kekayaan daerah itu adalah gedung pertemuan, rumah adat Somba Opu, Villa Pulau Larea-rea, sewa tenda sarnafil dan sewa alat selam. Hanya saja, terdapat tiga obyek pemakaian kekayaan daerah yang belum mendapatkan pemasukan, diantaranya hingga triwulan II adalah Rumah Adat Somba Opu, Villa Pulau Larea-rea dan sewa alat selam.

Untuk penarikan retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, yakni Taman Purbakala Batupake Gojeng, Air Terjun Lembang Saukang, Air Terjun Batubarae, Hutan Bakau Tongke-Tongke, Taman Hutan Raya (TAHURA), Pulau Larea Rea dan Benteng Balangnipa.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) Sinjai, Tamsil Binawan, mengaku penyebab nihilnya PAD hingga di bulan Juni 2024 karena tidak adanya yang ingin menyewa dan menginap di tempat tersebut.

“Rumah adat Somba Opu yang terletak di kota Makassar belum ada yang menyewa. Sama halnya, Villa Pulau Larea-rea belum ada menginap dengan besaran tarif Rp1 juta permalam,”

Adapun dalam hal tersebut, Siap-siap! Iuran sampah di Kota [Makassar](#) bakal naik.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Pemerintah Kota [Makassar](#) akan memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari retribusi sampah.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, jumlah pendapatan retribusi sampah setiap tahunnya diangka Rp35 miliar.

Hal ini tak sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah persampahan.

Plt Kepala DLH Kota Makassar Ferdi Mochtar mengatakan subsidi setiap tahunnya untuk penanganan sampah mencapai Rp200 miliar.

Itu mencakup pengadaan hingga pemeliharaan infrastruktur sampah atau transportasi dan alat angkut sampah.

Anggaran Rp200 miliar itu juga sudah termasuk biaya untuk membayar insentif petugas sampah.

Karenanya, Pemkot [Makassar](#) akan melakukan penyesuaian terhadap retribusi sampah.

Sebab, nilai yang ada sekarang ini dianggap sudah tidak relevan.

"Sekarang kota sedang godok perwalinya. Sudah di bagian hukum, dan kita akan bahas teknis bersama tim ahli hukum Pemerintah [Makassar](#)," ucap [Ferdinand Mochtar](#), Selasa (25/6/2024).

Kata Ferdi, penyesuaian ini harus dilaksanakan sebab merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada 5 Januari lalu.

Rancangan peraturan wali kota tersebut kata Ferdi juga telah dipaparkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Perwali ini kami sudah presentasikan di Kemendagri, karena ada keterkaitan dengan retribusi dan angka-angka, itu sudah kita diskusikan sampai di mana dapatkan turunan-turunan, mulai misalnya di tingkat rumah tangga miskin, menengah ke atas yang masing-masing berbeda tarif," paparnya.

Ferdi mencontohkan, retribusi sampah untuk keluarga miskin nilainya Rp25 ribu.

Hal tersebut disesuaikan dengan tarif listriknya, kalau misalnya Rp 900 watt ke bawah, nilainya Rp25 ribu per bulan.

Berdasarkan perwali yang berlaku sebelumnya, tagihan sampah untuk keluarga miskin Rp16 ribu per bulan.

"Jadi ada kenaikan kurang lebih sekitar Rp9.000, tapi kita tetap melihat perkembangan ditingkat masyarakat, makanya nanti ada perbaikan-perbaikan, tentunya kita akan rapatkan dan diskusikan kembali," ulasnya.

"Tapi kita juga melihat seberapa besar kontribusi pelayanan kita terhadap penanganan persampahan yang selama ini banyak di subsidi oleh pemerintah," sambungnya.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Terpisah, Wali Kota [Makassar Danny Pomanto](#) menyampaikan akan melakukan efisiensi terhadap seluruh armada sampah.

Danny merencanakan pembelian armada sampah listrik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024.

Danny berharap dengan menggunakan armada listrik, tidak ada lagi kebocoran anggaran operasional, khususnya dalam pembelian bahan bakar minyak.

Sehingga tidak ada lagi alasan tidak mengoperasikan armada karena tidak ada BBM.

Selain itu, untuk menghindari kebocoran iuran atau retribusi sampah, pembayarannya akan menggunakan aplikasi Pakinta’.

“Jadi tidak adami lagi yang bisa disalahgunakan. Langsung dibayar pakai Qris menggunakan

Sumber Berita:

1. <https://kabarsinjai.com/sepi-peminat-realisisasi-pad-sektor-pariwisata-sinjai-masih-25-persen/>
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/06/25/siap-siap-iuran-sampah-di-makassar-bakal-naik-warga-miskin-rp25-ribu-per-bulan>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

